

Islam Politik di Eropa (Dinamika Pengakuan Masyarakat Islam di Inggris & Prancis Abad 20)

Muflih Fahmi Kaunian
Universitas Sains Alquran
fahmikaunain92@gmail.com

Abstract

Islam as religion and power system had entered Europe since seven century, it was a long history for minority religion in present day. Even Islam had a monarchy power in West-East Europe and a strong history of education and social system for hundred years. But, after Cross War in 13rd century and Europe kingdoms colonized against Asia and Africa in 17th century, the history of powerful Islam in Europe, especially in Spain and France, was disappeared. Only a view academic records on philosophy, health knowledge and ancient unique buildings become a evidences of glorious of Islam. Nowadays, muslim in Europe are totally different situation, contrary to a thousand years ago. The End of War World II and the freedom of Asia and Africa Countries in 1945 made a climate of world politic changed. New countries in Asia and Africa, ex-colonized countries, become a marginal-countries in economic and politic. Especially muslim countries, this poor condition made some of their citizen moved and transmigrated to Europe countries and America for pursuit to better life. England and France, two favorite imigrant contries in Europe, especially for muslim from North Africa and Middle East. Unfortunately, their hopes for better life in the new home land faced a legal citizenship because of acception of their tribe-religion identity, that was not easy to accepted them for local society. There was no another way except a political fight for public policy acknowledgment to guaranteed their citizenship status, primarily for muslim society imigrant in 20th century.

Keywords: Political Islam, Muslim Society, Europe Immigrant 20th Century

Abstrak

Islam sebagai agama dan juga sistem kekuasaan telah memasuki benua Eropa pada abad ke tujuh masehi, sebuah sejarah yang sangat panjang untuk sebuah agama minoritas di Benua Biru hari ini. Padahal dari sejarahnya, dinasti Islam pernah berkuasa selama ratusan tahun di wilayah Barat-Daya Inggris ditambah dengan peninggalan kejayaan bidang ilmu pengetahuan dan tatanan sosialnya. Namun, setelah Perang Salib di abad ke 13 dan ditambah dengan penjajahan yang dilakukan kerajaan-kerajaan Eropa terhadap wilayah di Asia dan Afrika pada abad 17 menjadikan masyarakat Islam yang pernah berjaya di Eropa menjadi hilang begitu saja, hanya meninggalkan naskah-naskah akademik dalam bidang filsafat, kedokteran dan bangunan-bangunan bersejarah untuk bisa dinikmati dan menjadi bukti nyata saat ini. Hari

ini, umat muslim di Eropa dalam situasi yang sepenuhnya berbeda dengan keadaan seribu tahun yang lalu. Berakhirnya Perang Dunia ke II yang berarti kemerdekaan bagi negara-negara Asia dan Afrika, maka berubah juga iklim dan arah politik dunia. Negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka, menjadi negara yang secara ekonomi dan politik terpinggirkan. Terlebih bagi negara-negara muslim, keadaan tersebut menjadikan warga negaranya bermigrasi ke negara-negara di Eropa dan Amerika untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Inggris dan Prancis, menjadi dua negara terfavorit bagi para imigran Asia dan Timur Tengah, yang mana mayoritas adalah muslim. Sayangnya, harapan-harapan mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara baru tidak berjalan lancar begitu saja. Mereka harus menghadapi masalah status legal mereka sebagai warganegara yang sah, karena identitas ras dan agama mereka yang baru sama sekali bagi warga lokal sekitar. Sehingga tidak ada jalan lain selain perjuangan politik untuk mendapatkan pengakuan resmi melalui kebijakan negara yang sah untuk menjamin hak-hak kewarganegaraan mereka, terutama bagi masyarakat imigran muslim di abad ke 21.

Kata Kunci: Islam Politik, Masyarakat Muslim, Imigran Eropa Abad ke 20

Pendahuluan

Islam di Eropa memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai pada awal abad ke 7 M, Islam menaklukan Andalusia di bawah pimpinan Thariq bin Ziad. Hingga berakhir pada abad ke 14 saat diserang oleh pasukan Salib. Selanjutnya sejarah Islam di Eropa muncul kembali pada zaman modern ini (Fatah, 2002: 121). Memang terkesan melompat jauh dari pembahasan sebelumnya yaitu masuknya Islam di Eropa yang masuk dalam sejarah Islam klasik. Namun pembahasan tentang sejarah masuknya islam di Eropa tersebut menjadi penting sebagai pengantar dan titik tolak Islam di Eropa. Kemudian penulis mengambil Eropa sebagai objek kajiannya, karena Barat sendiri terbagi menjadi dua yaitu Amerika dan Eropa. Islam dan politik di Eropa yang dimaksud yaitu di mana umat Islam di negara-negara Eropa melakukan kegiatan politik secara nyata untuk memperjuangkan hak-haknya. Entah itu melalui organisasi, LSM, kelompok diskusi, dewan masjid dan bahkan organisasi yang memang didirikan untuk orientasi politik.

Dalam tulisan ini, penulis memilih dua negara besar Eropa, yaitu Inggris dan Prancis. Dua negara ini adalah wilayah Eropa yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak dan aktif dalam masalah politik di negara tersebut secara langsung. Di mana penduduk muslim di Inggris dan Eropa mendirikan organisasi dengan tujuan politis demi mempertahankan hak-hak kaum muslim di negara tersebut. Sedangkan di negara lain, seperti German, Belanda, Belgia, Portugal, Itali, Spanyol dan negara-negara di Skandinavia juga terdapat warga muslim. Terutama German, yang pertumbuhan warga muslimnya cukup tinggi. Akan tetapi tidak terdapat

organisasi politik dari warga muslim yang cukup signifikan perannya di negara-negara tersebut atau pergerakan sosial lainnya yang memiliki sejarah dan perjuangan panjang (An-Nadwi, 1979: 87).

Inggris memiliki warga muslim yang cukup banyak dan mereka kebanyakan berasal dari India. Warga muslim Inggris mendirikan organisasi-organisasi penting demi mendapatkan hak-hak politiknya sebagai warga negara. Berbeda dengan Inggris, warga muslim Prancis yang kebanyakan berasal dari imigran Aljazair, banyak dipengaruhi oleh kondisi politik negara asalnya. Sejarah panjang dan lika-liku terjal selalu ada dalam perjuangan warga muslim Eropa. Sehingga menjadi menarik untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana perpolitikan warga muslim di Inggris dan Prancis dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan mereka.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini Analisis-Deskriptif Kepustakaan. Metode ini merupakan metode penelitian dengan cara mengamati berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan tema penulisan. Adapun literasi yang digunakan berupa buku, makalah, jurnal ataupun dokumentasi lain yang terkait dan membantu penyusunan penulisan. Dalam tulisan ini sendiri, digunakan berbagai literasi berupa buku-buku yang membahas masalah politik islam atau aktivitas politik dan kekuasaan masyarakat muslim di Eropa. Baik yang menjelaskan politik Islam di Eropa di masa lampau maupun pada abad ke 20 sesuai fokus periode tulisan ini. Selanjutnya, data-data dan informasi yang didapat dari literasi-literasi yang terkait kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis sesuai sistematika isi atau pembahasan agar mudah dipahami.

Masuknya Islam di Eropa

Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan banyak melakukan perluasan wilayah. Mulai dari penaklukan Magribi atau Afrika Utara oleh Uqbah bin Nafi pada tahun 43-45 Hijriyah (675-682 M). Kemudian kerajaan Bizantium pada 52 Hijriyah (672 M), dan di bawah pimpinan Musa bin Nushair pada masa pemerintahan khalifah Walid meluaskan kekuasaannya sampai ke tepi Samudra Atlantik (Sumihara & Rahmat, 2013: 118).

Wilayah tepian Atlantik yang pertama dituju adalah Andalusia (Spanyol). Penaklukan Spanyol sendiri dilakukan atas permintaan Pangeran Alfonso, Putra Raja Witiza, pada Gubernur Musha bin Nushair, karena kekuasaannya direbut oleh Roderik. Untuk menaklukan Spanyol, Musa bin Nushair mengutus Panglima Thariq bin Ziad pada 711 M (Phillip, 1984: 87). Untuk sampai ke daratan Andalusia, Thariq bin Ziad harus melewati selat yang cukup lebar, yang karena perjalanannya itu selat tersebut dinamakan Selat Gibrartar atau Selat Jabal Thariq. Selain itu juga karena sebelum mendarat ke Andalusia, Thariq bin Zaid singgah ke sebuah pulau kecil dan menaklukannya kemudian diberi nama Pulau Gibraltar, untuk mengenang jasanya.

Proses penaklukan Spanyol sendiri tidak mendapatkan halangan yang berarti. Hal ini dikarenakan kelemahan orang-orang Spanyol dalam mempertahankan negaranya dan konflik yang terjadi di dalam internal mereka sendiri. Satu per satu daerah di Spanyol jatuh ke tangan kaum Muslim. Mulai dari Dixeres, yang karena penaklukan awal ini dengan mudah daerah-daerah lain di Spanyol dikuasai.

Pada tahun 732 M, pasukan Islam yang ada di Spanyol menyerbu Prancis hingga masuk ke kota Tours, Prancis Selatan. Pada penyerangan pertama ini, pasukan muslim mengalami kemenangan di bawah pimpinan Abdurrahman al Gafiqi yang saat itu menjabat sebagai gubernur Spanyol. Akan tetapi pada penyerangan selanjutnya, di wilayah antara Tours dan Poitiers, pasukan Muslim mengalami kekalahan yang cukup besar ketika berhadapan dengan jenderal Charles Martel. Dengan kekalahan ini, pasukan Islam hanya mampu menguasai wilayah Eropa di Andalus saja (Yahya, 1955: 45).

Namun pasukan Muslim masih melanjutkan penaklukannya. Yaitu di Negeri Thabristan di tepi Laut Kaspiah yang dipimpin oleh Panglima Yazid bin Mahlab. Kemudian pada masa Hisyam bin Abdul Malik, pasukan muslim terus menerus memerangi kerajaan Bizantium dan Turki di Kaukasia. Dengan perluasan tersebut, dunia Islam pada masa pertengahan abad ke 8, meliputi Jazirah Arab, Irak, Iran, Syiria, Palestina, Mesir, Afrika Utara, sampai ke Samudra Atlantik, Spanyol, Asia Tengah bahkan sampai ke sebagian Tiongkok, Rusia Selatan dan India.

Pada saat terjadi pemberontakan terhadap Kekhalifahan Umayyah oleh Dinasti Abbasiyah, Spanyol menjadi wilayah yang juga tidak lepas dari target penaklukan. Pada tahun 750 M, Abdurrahman bin Muawwiyah berhasil meloloskan diri ke luar Spanyol dari pengejaran pasukan Abbasiyah dengan cara melakukan berbagai penyamaran. Dari satu wilayah ke wilayah lain dia bertahan hidup dari pengejaran dan pembunuhan Abbasiyah. Namun tak lama kemudian, di kembali ke Spanyol dengan bantuan pemimpin daerah Andalusia yang masih mendukung Abdurrahman. Setelah menetap di Spanyol beberapa lama, Abdurrahman

menghimpun kekuatan untuk kembali menaklukkan Spanyol. Hingga akhirnya pada 756 M, Abdurrahman kembali menguasai Spanyol dan mendapat julukan Ad-dakhil.

Keruntuhan Khilafah Umayyah di Spanyol terjadi pada tahun 976 M, pada masa Khalifah Abdurrahman III (Thohir, 1998: 258). Dikarenakan perpecahan untuk merebut pengaruh terhadap khalifah yang terjadi di antara bangsa Arab, Barbar, Slavia dan Spanyol. Selain itu juga munculnya khalifah tandingan yang didirikan oleh Ali bin Hammud. Wilayah Andalusia pun menjadi pecah, dan tidak ada pemerintahan yang satu saat itu. Hanya ada Muluk al-Thawaif atau raja-raja golongan. Hingga masuknya pasukan Kristen yang menaklukkan satu per satu kota di Spanyol yang merupakan rangkaian perang Salib. Bani Ahmar menjadi satu-satunya kerajaan Islam yang tersisa dan menjadi tempat penampungan para pelarian muslim Spanyol yang dikejar tentara Salib. Wilayah Bani Ahmar pun menjadi padat penduduk dan menderita kelaparan, dengan mudah tentara Salib mengepung kerajaan Bani Ahmar. Akhirnya, Raja Abi Abdullah menyerah pada Raja Ferdinand pada tahun 1492 M. Maka dengan demikian berakhirilah kekuasaan Islam di tanah Andalusia selama-lamanya setelah berabad-abad berkuasa.

Islam dan Politik di Eropa

Islam dan Politik di Inggris

Dengan Islam sebagai agama terbesar kedua di Inggris, warga muslim di negara ini memiliki sejarah pengembangan agama. Orang-orang Yaman di abad 19 telah datang sebagai pekerja di kapal yang kemudian berhasil membuat komunitas muslim yang pertama di Inggris. Seiring dengan manuver Inggris sebagai negara penjajah, sejumlah muslim yang berasal dari negara-negara koloni pindah ke Inggris karena mendapatkan tawaran pekerjaan, terutama pada tahun 1960-an (Gilles, 2003: 152).

Pada tahun 1950, warga muslim dari India dan Pakistan yang bermigrasi ke Birmingham atau Bradford mulai bisa menikmati status hukum yang sama dengan penduduk pribumi Inggris. Masjid-masjid mulai bermunculan dalam waktu yang tidak lama. Baru pada tahun 1970, para imigran muslim India yang menetap di Inggris mulai diakui keberadaannya secara resmi dengan mengikutsertakan dalam partisipasi politik pemilihan umum, karena partai politik di Inggris saat itu berusaha mendapat dukungan suara etnis. Walaupun kaum imigran ini belum bisa berbahasa Inggris dan sikap-sikap politiknya masih merujuk pada negara asalnya. Hingga pauncaknya pada tahun 1992 warga muslim lebih pro-aktif dalam partisipasi politik.

Beberapa sudah mulai membangun hubungan dengan pemerintah Inggris, bahkan pemerintah ikut mendukung pembangunan masjid di pelabuhan di Wales. Selanjutnya antara rentang tahun 1950-1970, masjid-masjid mulai banyak didirikan. Mulai dari kota Coventry, Preston, West Yorkshire, Manchester dan Birmingham. Birmingham menjadi kota paling cepat perkembangannya bagi warga muslim karena masjid berkembang begitu pesat, terutama antara tahun 1950-1960.

Pertama, hal ini dikarenakan banyak imigran muslim menjadi tenaga kerja tak terlatih yang terkonsentrasi perumahannya hanya di beberapa blok perumahan. Kedua, sebelum terbentuknya komunitas muslim, banyak dari kaum imigran yang ingin bertemu dan berkumpul dengan saudara di negara asalnya, sehingga memunculkan masjid-masjid yang bersifat kedaerahan India maupun Pakistan. Ketiga, perbedaan tafsir dalam sesama kaum muslim menjadikan mereka terpecah dalam berbagai golongan. Di Inggris sendiri terdapat dua golongan atau aliran besar yang dianut warga muslim Inggris. Pertama yaitu aliran Deobandi. Aliran ini memiliki paham pembelaan terhadap ortodoksi sunni dengan ketat dan pendalaman sufistik. Berbeda dengan Deobandi, Aliran yang kedua yaitu Barelvi, yang mana aliran ini sangat memuja terhadap Nabi Muhammad. Aliran ini seperti aliran Wahabi di Indonesia, yang tidak hanya menentang setiap penyimpangan dan ajaran barat, tetapi juga terhadap kalangan muslim sendiri yang berbeda paham (Albert, 1998: 163).

Warga muslim Inggris sendiri dalam kegiatan politiknya bersikap anti terhadap Partai Konservatif yang dianggap anti terhadap imigran. Karena lebih memperhatikan pekerja kulit putih dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Partai Buruh guna mendapat suara dan dukungan "etnis minoritas" dalam berbagai pemilihan umum daerah di berbagai kota. Seperti yang terjadi di Birmingham dan Bradford. Hingga akhirnya salah satu perwakilan muslim mendapat jabatan sebagai kepala Race Relation Unit dewan kota Birmingham, yang notabene merupakan mantan sekretaris masjid di daerah Birmingham sendiri. Hal ini menjadi angin segar bagi warga muslim untuk mendapat akses ke pemerintah kota untuk mendapat hak-hak masyarakat minoritasnya.

Namun bagi para pemimpin komunitas Islam, baik yang mendapat jabatan di pemerintah maupun tidak, akses ke politik bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya instrumen untuk memperkuat posisi kekuasaan dan pengaruh atas sesama warga muslim di Inggris. Dalam kampanye pemilihan umum 1987, warga muslim se-Inggris Raya diminta untuk aktif oleh salah satu partisipan dalam pemilu yang dindikasikan dari Partai Buruh untuk memilih calon yang akan memperjuangkan masyarakat muslim mendapatkan payung hukum Islam untuk mendapat hak-hak pendidikan di Inggris. Puncaknya pada tahun 1992 sebelas warga muslim di Kota Bradford terpilih menjadi anggota dewan kota, semuanya tergabung dalam Partai Buruh.

Untuk mawadahi warga muslim di Inggris secara luas dan berskala nasional, dibentuklah Dewan Masjid. Dewan Masjid ini dibentuk untuk menyuarakan aspirasi komunitas muslim serta memperjuangkan identitas Islam mereka. Anggota Dewan Masjid ini terdiri dari para wakil yang mendapat mandat atau mewakili dari berbagai kelompok Islam dan masjid yang ada. Cari ini menjadi solusi atas perbedaan yang cukup keras antara kelompok Barelvi dan Deobandi utamanya dan juga kelompok-kelompok islam lain yang lebih kecil. Tugas utama dewan masjid ini adalah menjadi wakil warga muslim untuk mengadakan dialog dan negosiasi pemenuhan hak-hak mereka dan menjadi pengelola kegiatan sosial bagi warga muslim. Sehingga terjadi hubungan yang cukup baik antara warga muslim dan pemerintah lokal maupun kerajaan.

Akan tetapi, hubungan yang sudah mulai terbangun dengan baik itu tiba-tiba berubah 180 derajat. Tepatnya pada tahun 1988, saat buku berjudul *The Satanic Verses* diterbitkan di Inggris Tengah merusak hubungan baik tersebut. *The Satanic Verses* merupakan novel karya Rushdie yang merupakan keturunan imigran muslim dari daratan India, yang isinya dinilai telah melecehkan Nabi Muhammad, istrinya dan para sahabatnya. Sontak, menjadi marah warga muslim Inggris bahkan dunia atas tulisannya. Padahal karir Rusdhie sebagai penulis sudah terbilang baik bahkan menjadi bintang diantara penulis non-kulit putih karena kekritisannya terhadap pemerintah dan pembelaannya terhadap minoritas. Prestasi Rushdie menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga keturunan Pakistan dan India.

Kasus Rushdie ini bisa dibilang bencana bagi warga muslim Inggris, karena hujatan diberikan tidak hanya dari para pemimpin Islam Inggris, tetapi dari berbagai pemuka Islam dunia lainnya. Dari dalam negeri, ketua Dewan Masjid Bradford memberikan fatwa agar segera mengeksekusi siapapun yang ikut terlibat dalam pembuatan buku tersebut. Sedangkan dari luar Inggris, Ayatulloh Khomeini ikut andil dalam memberikan kritik terhadap Rushdie, ia pun memfatwakan mati bagi Rushdie. Bahkan konferensi OKI pun ikut membahas kasus Rushdie ini dengan mengutuk novel tersebut sebagai kejahatan besar, dan memerintahkan hukuman mati apabila Rushdie sedang berada di negara muslim (Nielson, 1955: 259).

Empat hari setelah fatwa-fatwa dan ancaman itu muncul, Rushdie yang awalnya tidak menyadari kemarahan umat Islam ini kemudian menyatakan penyesalannya di publik dan media. Bahwa dia sangat menyesal akan rasa sakit hati kaum muslim dan menyarankan agar lebih hati-hati agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi negara yang memiliki pluralitas agama. Kasus Rushdie menjadi titik nadir hubungan warga muslim dan pemerintah Inggris yang harus memberikan tenaga dan waktu ekstra untuk menyelesaikan konflik yang mengancam keamanan negara. Masalah ini mengindikasikan bahwa agama yang harusnya menjadi nilai dan

identitas bersama. Akan tetapi bagi kelompok akar rumput yang terlalu vokal dalam menggunakan bahasa komunalnya menjadikan kontradiksi-kontradiksi sosial muncul kepermukaan. Begitulah Islam dan politik di Inggris.

Islam dan Politik di Prancis

Islam di Prancis mulai muncul sebenarnya sudah beberapa abad yang lalu tepatnya pada abad ke 7, ketika Islam menguasai Andalusia, pada masa kekhalifahan Umayyah. Ketika itu di Andalusia pengembangan wilayah terus diperluas hingga sampai di pinggiran Prancis. Namun, untuk kaum muslim yang masih bertahan sampai saat ini di Prancis bukanlah berasal dari sisa-sisa kekhalifahan di Andalusia. Akan tetapi dari imigran Afrika utara tepatnya Al-Jazair. Baru pada tahun 1970, warga Islam di Prancis baru bisa membangun jaringan antarumat Islam dan mendirikan masjid. Tahun-tahun selanjutnya banyak pemuda muslim imigran yang mulai mengenyam pendidikan tinggi di Prancis. Kebanyakan mereka mengambil ilmu alam. Tujuan mereka bersekolah agar ketika mereka kembali ke negara asalnya bisa membenahi negara dan menegakan negara Islam, karena melihat pengalaman mereka di Barat. Sehingga hubungan dengan negara asal masih sangat kuat. Terutama imigran Al-Jazair dan negaranya.

Masalah politik di Al-Jazair pun sangat mempengaruhi pandangan dan tindakan warga muslim Prancis. Terutama bagi warga imigran muslim Al-Jazair yang memang mendominasi jumlah muslim di Prancis. Apalagi dengan kemenangan partai FIS (Front Islamique de Sault) di Al-Jazair yang mampu mengalahkan partai penguasa sebelumnya. Kemenangan ini sangat mempengaruhi pandangan politik dan keislaman warga Islam di Prancis. FIS adalah partai yang didirikan pada 1989 di Al-Jazair yang menjadi partai penampung aspirasi masyarakat kelas bawah dan grassroot. Dengan kemunculan FIS dan pengaruhnya yang sampai ke Prancis.

Pada tahun 1989, meletuslah “kasus Jilbab” setelah tiga pelajar perempuan sekolah menengah dikeluarkan, lantaran memakai jilbab di kelas. Yaitu pada saat kelas olahraga. Dengan alasan ketika berolahraga dilarang menggunakan atribut keagamaan apapun, maka ketiga gadis muslim itu dikeluarkan. Masalah ini menjadi besar dan panjang ketika protes dari seluruh warga muslim tidak bisa dibendung lagi. Hal ini dikarenakan ada sedikit provokasi dari Al-Jazair sendiri yaitu melalui FIS. Karena dianggap mengkhawatirkan, Polisi Prancis mengambil tindakan tegas terhadap FIS di Prancis. Hingga pada 1993 polisi pernah melakukan tindakan represif pada FIS di Prancis karena manuver politiknya di kalangan warga muslim yang mengancam keamanan Prancis.

Untuk mencegah semakin besar pengaruh FIS terhadap warga muslim Prancis, maka perwakilan dari pemerintah mencoba sebuah solusi dialog. Pierre Joxe yang mewakili pemerintah mengumpulkan tokoh-tokoh muslim Prancis untuk duduk

bersama mencari solusi. Dialog ini menghasilkan sebuah group discussion yaitu CORIF (Discussion Group on Islamic de Paris) pada tahun 1990 (Darsh, 1980: 52). Sebuah lembaga konsultatif yang tidak memiliki wewenang memutuskan, akan tetapi untuk berfungsi membantu pemerintah dalam mengendalikan, menengahi dan memecahkan masalah warga muslim di Prancis. Anggota CORIF terbagi menjadi dua. Pertama yang terdiri dari para akademisi, pengusaha, pejabat tinggi pemerintah yang mendapat legitimasi dari prestasi mereka sebagai pemimpin agama. Kedua yaitu para pemimpin agama Islam yang telah diperkenalkan kepada menteri dalam negeri Prancis dan mendapatkan akses saat mereka berhubungan dengan anggota parlemen atau pejabat pemerintah.

CORIF dalam menjalankan kewajibannya, mendapatkan tantangan dari kalangan Islam sendiri, dengan kemunculan OUIF (Union of Islamic Organization in France). Organisasi ini berdiri karena terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin-nya Hasan al-Bana di Mesir. Latar belakang para pengurusnya yang berpendidikan tinggi, mampu berbahasa Arab dan Prancis menjadi kan OUIF muncul sebagai kelompok Islam yang paling berpengaruh di Prancis. Tidak lain karena keprofesionalisannya dalam pengorganisasian, aktif dalam kegiatan sosial, kritis dalam kasus jilbab dan aktif dalam menyebarkan dakwahnya kepada warga muslim Prancis. Kita bisa melihat, bahwa usaha pemerintah Prancis untuk memediasi warga muslim tidak selalu mendapat tanggapan baik, malah menjadi perpecahan di kalangan warga Islam Prancis sendiri. Bisa dikatakan Islam di Prancis masih sangat kental akan tuntutan identitas komunal karena usaha-usaha pemerintah yang ada dianggap tidak cukup.

Penutup

Islam datang ke Eropa pada abad ke 7 Masehi dan menjadi sebuah imperium yang besar pada abad ke 10 Masehi, dengan berbagai warisan besar baik dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial-politik maupun arsitektur bangunannya. Namun pada abad selanjutnya, tepatnya ketika Perang Salib berkejolak, kejayaan Islam di Eropa pun mulai memudar sinarnya.

Berbeda keadaan secara drastis di zaman modern ini, di mana mobilitas umat beragama berkembang begitu cepat tanpa mengenal batas wilayah negara bangsa. Umat Islam menyebar di berbagai penjuru dunia, dalam hal ini Eropa, yaitu Inggris dan Prancis, sebagai imigran. Di mana warga Islam memiliki sejarah dan proses politik yang panjang daripada negara-negara lain di belahan Eropa lainnya. Di Inggris, warga muslim walaupun sebagai minoritas namun tetap mendapatkan hak-hak politiknya baik itu memilih maupun di pilih. Namun kewarganegaraannya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, status hukum yang berbeda yang memberikan

hak lebih bagi kaum pribumi Inggris daripada kelompok lain. Kedua, pemantauan statistik yang didasarkan pada ras dan etnis yang menghasilkan kebijakan “diskriminasi positif” yang memihak kelompok minoritas.

Sedangkan di Prancis, tradisi politiknya yang aktif dalam penanganan setiap identitas regional, etnis, atau keagamaan yang berpotensi mengancam hubungan antara individu dan negara. Negara berusaha merangkul ekspresi keagamaan dalam kerangka hukum yang mengontrol ibadah dan menolak setiap perlakuan hukum yang berbeda. Kewarganegaraan di Prancis bisa di dapat oleh warga negara lain yang sudah tinggal dalam kurun waktu tertentu yang cukup lama. Selain itu mensyaratkan akulturasi, penguasaan bahasa Prancis, dan menerima konstitusi. Dengan demikian, kasus di Prancis sangat berbeda dengan Inggris dalam masalah kewarganegaraan yang akan berpengaruh penting terhadap pemenuhan hak-hak politik warga muslim di kedua negara tersebut.

Hingga hari ini, perjuangan masyarakat muslim di Eropa masih harus melalui perjalanan yang panjang bahkan bisa dibilang terjal. Pengakuan secara legal-formal sebagai imigran yang diakui kewarganegaraannya pun tidak cukup untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat muslim di Eropa. Permasalahan yang muncul di abad ini lebih pada sikap masyarakat lokal dan beberapa pejabat resmi yang anti-terhadap Islam sebagai sebuah sistem keyakinan karena terorisme yang semakin menjadi-jadi di abad ke 21. Gerakan Islamophobia pun muncul secara terang-terangan di berbagai negara di Eropa, bahkan semakin hari semakin membesar. Masyarakat muslim seolah menjadi pesakitan. Nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan yang lahir di Eropa dan menjadi slogan bangsa barat, seolah tidak berlaku bagi masyarakat muslim di sana. Padahal dunia semakin maju dan modern, dan semangat kesetaraan harusnya sudah tidak diperdebatkan lagi. Mungkin pada kesempatan lain akan dibahas secara lebih gamblang dan jelas terkait permasalahan muslim di Barat pada abad 21 dewasa ini.

Daftar Pustaka

- Albert, H. (1998). *Islam dalam Pandangan Eropa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- An-Nadwi, AH. (1979) *Islam and The World*. Lucknow: AIRP.
- Darsh, SM. (1980). *Muslim in Europe*. London: Ta-Ha Publisher.
- Fatah, S. (2002). *Sejarah Peradaban Islam*. Semarang: Rizki Putra.
- Gilles, K. (2003). *Allah in The West*. Yogyakarta: Jendela.
- Nielson, J. (1955). *Muslim in Western*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Phillip, HK. (1984). *Islam and The West*. Bandung: Sinar Baru.

Sumihara & Rahmat. (2013). *Sejarah Islam Klasik*. Yogyakarta: Ombak.

Thohir, M. (1998). *Sejarah Islam dari Andalusia sampai Indus*. Yogyakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Yahya, HM. (1955). *Perang Salib dan Pengaruh Islam di Eropah*. Yogyakarta: Bina Usaha.